

PERAN ETNISITAS DAN BASIS MASSA ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KOTA DENPASAR

Dito Dominggus Jonathan¹ Gede Indra Pramana² Tedi Erviantono³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ditojonathan18@gmail.com¹ indraprama@unud.ac.id² ervantono2@unud.ac.id³

ABSTRACT

This research investigates the political influence of the Chinese ethnic community in the 2019 legislative election in Denpasar City, with a focus on the victory of legislative candidate Agus Wirajaya. Utilizing qualitative methodology and descriptive methods, data from interviews and documentation with ten informants, including Agus Wirajaya himself, leaders of the Chinese ethnic community, political party leaders, youth leaders, and Agus Wirajaya's voters, were analyzed. The research findings indicate that the involvement of the Chinese ethnic community in the election was facilitated by the political rights equality for Indonesian citizens. Additionally, the Theory of Political Identity reveals the significance of Primordialism and Instrumentalism in identity politics during the legislative election. Support from political parties, family, relatives, and the general public proved to be crucial factors contributing to Agus Wirajaya's success in the 2019 legislative election.

Keywords: *Political Identity Theory, Chinese Ethnicity, Legislative Elections.*

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi di Indonesia telah memberdayakan warganya untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, memungkinkan mereka untuk memberikan suara dan terpilih dalam pemilu. Prinsip dasar demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pada tahun 2019, Indonesia menyaksikan momen bersejarah dengan menyelenggarakan pemilu serentak pertama kali, di mana warga memiliki

kesempatan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan anggota legislatif nasional dan lokal, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Indonesia dikenal dengan masyarakat multikultural dan multi etnis yang mencakup beragam komunitas dengan latar belakang etnis, bahasa, agama, dan ras yang berbeda. Keanekaragaman ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari

Sabang hingga Merauke. Istilah “multikultural” digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai kelompok etnis di Indonesia.

Dalam konteks kontestasi demokrasi nasional dan lokal, identitas etnis memainkan peran yang setara sebagai dasar untuk mencapai kekuasaan politik. Etnisitas bertujuan untuk memastikan bahwa individu-menentukan pilihan mereka berdasarkan identifikasi etnis yang sama dan kemampuan komunitas untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama di berbagai kelompok dan organisasi. Dengan kata lain, ini melibatkan politisasi kepentingan etnis untuk mencapai keuntungan politik, di mana individu menyelaraskan pilihan mereka berdasarkan kesamaan etnis. Toleransi sangat penting dalam masyarakat multikultural, terutama dalam masyarakat seberagam Indonesia. Perpaduan berbagai etnis di Indonesia telah menciptakan kekuatan politik baru yang secara signifikan mempengaruhi pola pemilihan di negara ini. Hal ini terlihat dari munculnya politik identitas, di mana sebelum reformasi, politik identitas di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan identitas agama. Namun, seiring berjalannya waktu, politik identitas telah meluas untuk mencakup identitas lain, seperti identitas etnis.

Fenomena ini teramati di berbagai wilayah, terutama di Denpasar, di mana seorang kandidat keturunan Tionghoa berhasil mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Dapil 3 Denpasar Utara. Kejadian ini unik mengingat mayoritas etnis di

Denpasar Utara adalah suku Bali, sehingga berbeda dengan latar belakang etnis kandidat tersebut. Bali, sebagai provinsi, sebagian besar ditandai oleh struktur etnis dan budaya Bali. Akibatnya, kelompok etnis yang tinggal di Bali dari luar provinsi cenderung menyesuaikan diri dengan pola budaya Bali untuk melestarikan identitas etnis mereka sendiri sambil hidup berdampingan secara harmonis dengan budaya Bali. Untuk menjaga keberadaan budaya Bali dan budaya non-Bali, pembentukan komunitas atau organisasi yang berbeda sangat penting. Salah satu komunitas yang mewakili suku Bali adalah kelompok pemuda “Abigangsa” yang berdedikasi untuk melestarikan warisan budaya dan seni Bali.

Demikian pula, komunitas Tionghoa di Bali diwakili oleh organisasi seperti “Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia” (PSMTI), “Inti Tionghoa,” dan organisasi berbasis agama Buddha “Walubi.” Asosiasi etnis ini dibentuk oleh individu yang memiliki latar belakang etnis yang sama. Selain itu, organisasi-organisasi ini aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan inisiatif (Rizki, Sutrisno, & Ramazan, 2020). Dalam konteks pemilihan legislatif, komunitas etnis dan asosiasi ini dimanfaatkan oleh calon-calon yang berambisi untuk mendapatkan dukungan dan suara, sehingga etnisitas menjadi faktor penting dalam lanskap politik. Salah satu contoh menonjol adalah Agus Wirajaya, seorang kandidat keturunan Tionghoa, yang berhasil meraih kursi legislatif di DPRD Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia

(PSI). Agus Wirajaya, SE. S.Ag, seorang politisi muda, mengamati bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini merupakan momentum yang tepat bagi para kandidat untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih.

Pada periode legislatif 2019-2024, Agus Wirajaya mencalonkan diri untuk DPRD Dapil 3 Kota Denpasar dalam pemilihan serentak 2019. Untuk kejutan banyak orang, Agus Wirajaya, yang mewakili komunitas etnis Tionghoa, berhasil meraih kursi di DPRD Kota Denpasar dengan 1.210 suara sah. Prestasi ini patut diperhatikan, mengingat mayoritas pemilih etnis Bali yang dominan di Denpasar Utara. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran etnisitas dalam kemenangan Agus Wirajaya dalam Pemilu Legislatif 2019 di Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang interaksi rumit antara etnisitas, basis massa, dan kesuksesan politik di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Memahami dinamika ini akan memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas politik identitas dan implikasinya bagi demokrasi representatif di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Pada tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak pertama kali, sesuai dengan amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan ini memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu secara serentak dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat anggaran negara. Pemilu serentak tersebut menggabungkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan anggota legislatif. Pemahaman mengenai pemilu tahun 2019 didukung oleh kajian pustaka dari Ardipandanto (2019) dan Prasetio & Sianipar (2021). Ardipandanto menjelaskan bahwa pemilu serentak merupakan hasil dari gugatan terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke MK. Putusan MK menyatakan pemisahan pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu legislatif tidak konstitusional.

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mengeluarkan putusan bahwa pemisahan pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu legislatif tidak konstitusional. Artinya, pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu legislatif harus tetap diselenggarakan secara serentak atau dalam satu waktu yang sama. Sebelumnya, terdapat wacana untuk memisahkan pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu legislatif. Pemisahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemilihan dan mengurangi biaya serta beban logistik dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, setelah mengadakan uji materi, MK menyatakan bahwa pemisahan pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengubah sistem pemilihan umum yang telah diatur di dalam konstitusi.

Dengan putusan ini, pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu legislatif akan tetap diselenggarakan secara bersamaan, seperti yang telah dilakukan dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Keputusan MK ini memiliki dampak penting terhadap tata cara dan sistem pemilihan umum di Indonesia, serta menegaskan kembali prinsip keserentakan dalam proses demokrasi pemilihan wakil rakyat dan kepala negara. Prasetio & Sianipar (2021) menegaskan bahwa konsep pemerintahan demokratis diatur dalam Pasal 1 Ayat 1(2) UUD 1945, yang menekankan kedaulatan rakyat. Pemilu serentak adalah salah satu implementasi demokrasi yang menguatkan peran rakyat dalam proses pemilihan.

Di tingkat lokal, partisipasi dalam pemilu di Bali secara keseluruhan sudah baik, tercermin dari upaya pemerintah dan media untuk memberikan edukasi pemilih melalui budaya lokal. Hal ini menunjukkan peran aktif pemerintah Bali dalam politik dan kesadaran politik masyarakat. Secara keseluruhan, pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia menghadirkan langkah maju dalam proses demokrasi dengan meningkatkan partisipasi dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Dengan menyelenggarakan pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu legislatif secara bersamaan, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi meningkat. Pemilih memiliki kesempatan untuk memilih anggota legislatif dan kepala negara secara bersamaan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya.

Dengan mengadakan pemilu serentak, biaya dan logistik penyelenggaraan pemilu dapat lebih efisien. Hal ini mengurangi beban fiskal dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk keberlangsungan proses pemilihan. Pemilu serentak memastikan bahwa kepemimpinan pemerintahan dan legislatif dapat segera diisi setelah pemilu selesai. Kepala negara dan anggota legislatif yang terpilih dapat langsung bekerja membangun negara tanpa jeda waktu yang lama. Dengan pemilihan serentak, adanya kejelasan waktu kepemimpinan dan partisipasi yang lebih tinggi, stabilitas politik cenderung meningkat. Pemilih memberikan suara mereka untuk semua tingkatan pemerintahan dalam satu kesempatan, sehingga lebih mungkin untuk menciptakan keselarasan antara pemerintah dan legislatif.

Pemilu serentak mendukung prinsip keserentakan dalam sistem politik Indonesia. Dengan mengadakan pemilihan serentak, negara memperkuat prinsip demokrasi yang mendasari sistem politiknya, yaitu penguasaan kekuasaan oleh rakyat. Proses pemilu juga memiliki tantangan dan perlu terus diperbaiki agar demokrasi semakin matang dan partisipasi masyarakat semakin tinggi. Penyelenggaraan pemilu yang efisien, transparan, dan adil sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia.

2.2 Landasan Teoritis dan Konseptual

Penelitian politik identitas dalam konteks pemilihan anggota legislatif di Indonesia, khususnya pada pemilu serentak 2019 di Denpasar, melibatkan pengembangan teori dari berbagai ahli. Identitas menurut Hogg dan Abrams (1998) adalah konsep sosial tentang siapa seseorang, bagaimana mereka, dan bagaimana hubungan mereka dengan individu lain. Sedangkan menurut Phinney dan Alipora (1990), identitas etnis melibatkan komitmen dan rasa kepemilikan pada kelompok etnis, evaluasi positif terhadap kelompok, minat dan pengetahuan tentang kelompok, serta partisipasi dalam aktivitas sosial kelompok.

Individu yang memiliki identitas etnis yang kuat merasa memiliki ikatan emosional dan komitmen terhadap kelompok etnis mereka. Mereka merasa bangga menjadi bagian dari kelompok tersebut dan mengidentifikasi diri mereka dengan budaya, nilai-nilai, dan tradisi kelompok etnis. Identitas etnis juga melibatkan evaluasi positif terhadap kelompok etnis sendiri. Individu yang kuat dalam identitas etnis cenderung memiliki pandangan positif tentang kelompok etnisnya dan menghargai kontribusi budaya mereka. Individu yang mengidentifikasi diri dengan kelompok etnisnya memiliki minat dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang sejarah, tradisi, bahasa, dan adat istiadat kelompok mereka.

Fenomena politik identitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada tiga pendekatan yang dijelaskan oleh Pierre Van Den Bergh dan Abdilah (dalam Sari, 2016), yaitu primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Pendekatan konstruktivis

menganggap identitas agama dan budaya sebagai hasil dari proses kompleks di mana batas-batas simbolik terus dibangun melalui mitos bahasa dan pengalaman masa lalu. Pendekatan ini berfokus pada negosiasi dan perubahan identitas etnis dan agama yang dipengaruhi oleh perjuangan politik antara kelompok-kelompok yang ada.

Frederik Barth (1988) lebih lanjut menyatakan bahwa agama dan etnisitas terus berubah, dan batas-batas milik kelompok etnis sering dinegosiasikan kembali. Pendekatan konstruktivis Barth berpendapat bahwa kelompok itu sendiri membentuk pola identitasnya sendiri dan pembentukan batas dan fitur ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Instrumentalisme, pandangan ketiga, lebih memperhatikan peran instrumental dalam manipulasi dan mobilisasi politik.

Dalam masyarakat multikultural seperti di Kota Denpasar, terdapat beragam etnis dan budaya, termasuk etnis minoritas dan imigran. Pembentukan identitas etnis dan agama terjadi melalui proses interaksi dan percampuran budaya antara masyarakat pribumi (asli) dan masyarakat pendatang. Penelitian tentang politik identitas di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu serentak 2019 di Denpasar, melibatkan pemahaman tentang konsep identitas menurut para ahli dan pendekatan dalam pembentukan identitas. Fenomena politik identitas ini kompleks dan berkaitan dengan proses negosiasi, perubahan, dan mobilisasi politik untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan.

Politik identitas melibatkan negosiasi antara berbagai kelompok dan individu yang memiliki identitas yang berbeda. Setiap kelompok atau individu berusaha untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka, sehingga terjadi tawar-menawar dan pencarian kesepakatan dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu. Identitas etnis dan politik identitas dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa terjadi karena adanya pergeseran sosial, ekonomi, budaya, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi dan kesadaran kelompok atau individu terhadap identitas mereka.

Politik identitas seringkali digunakan sebagai alat untuk memobilisasi massa atau kelompok tertentu dalam mendukung suatu kandidat atau partai politik. Pemimpin politik dapat memanfaatkan identitas etnis atau identitas lainnya untuk memperoleh dukungan dan menciptakan solidaritas antara anggota kelompok tersebut. Identitas etnis, agama, atau budaya merupakan bagian dari kompleksitas sosial dan budaya suatu masyarakat. Politik identitas menjadi relevan ketika ada perbedaan-perbedaan yang dianggap penting dalam lingkup sosial dan budaya tersebut.

Media massa dan narasi politik memiliki peran penting dalam membentuk politik identitas. Berita, propaganda, atau retorika politik dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap identitas kelompok tertentu, baik secara positif maupun negatif. Politik identitas juga berkaitan dengan penguasaan politik dan hak partisipasi. Beberapa kelompok

masyarakat mungkin merasa diabaikan atau tidak terwakili dalam proses politik, sehingga politik identitas menjadi sarana untuk menyuarakan hak-hak mereka.

Melalui pemahaman atas kompleksitas fenomena politik identitas, diharapkan para pemimpin politik dan masyarakat secara keseluruhan dapat lebih bijaksana dalam mengelola perbedaan dan memperkuat persatuan dalam konteks politik. Pengakuan akan keberagaman identitas dan penghargaan terhadap hak partisipasi setiap warga negara merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran etnis Tionghoa dan basis massa dalam kemenangan Agus Wirajaya dalam pemilu legislatif 2019 di Denpasar Utara. Lokasi penelitian berada di Denpasar Utara, yang merupakan daerah pemilihan dari Agus Wirajaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data utama yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data tambahan yang mencakup berbagai buku ilmiah, laporan jurnal, postingan media sosial, dokumen tertulis, rekaman suara, gambar, dan video terkait politik identitas dan peran etnis dalam kemenangan Agus Wirajaya.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles & Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data yang dikumpulkan dikelompokkan sesuai kategori untuk memudahkan analisis. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tulisan lengkap dan detail untuk memahami hasil observasi dan wawancara. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan/verifikasi, di mana data yang telah direduksi dan disajikan akan diinterpretasi dan disimpulkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peran etnisitas dan basis massa dalam kemenangan Agus Wirajaya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data reduksi untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari wawancara dan observasi. Kemudian, data tersebut akan dianalisis dengan mengacu pada teori politik identitas berdasarkan pendekatan konstruktivis yang menggambarkan bagaimana etnisitas dan politik identitas digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas penduduk beragama Hindu dan berasal dari suku Bali, tetapi juga terdapat jumlah penduduk beragama selain Hindu dan suku Bali yang cukup signifikan. Pemilu legislatif 2019 di Kota Denpasar Utara memiliki 12 kursi anggota legislatif yang berasal dari 6 partai yang berbeda. Partai PDIP mendominasi dengan 6 kursi, dan

Partai PSI berhasil meraih 1 kursi yang diwakili oleh Agus Wirajaya. Kemenangan Agus Wirajaya pada pemilu legislatif 2019 dipengaruhi oleh strategi politik yang menggunakan teori politik identitas dengan pendekatan primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Penelitian ini memfokuskan pada peran etnis Tionghoa dan basis massa dalam kemenangan Agus Wirajaya di Denpasar Utara.

Dalam pemilihan tersebut, PSI sebagai partai baru di Indonesia berhasil meraih 2 kursi, dan Agus Wirajaya yang berasal dari etnis Tionghoa dan diusung oleh PSI berhasil meraih kursi wakil rakyat Kota Denpasar. Penggunaan teori politik identitas membantu dalam memetakan masyarakat Denpasar Utara dan dikemas dengan baik agar diterima dengan baik oleh pemilih. Rangkuman tersebut menjelaskan tentang keterlibatan langsung etnis Tionghoa dalam pemilu legislatif di Kota Denpasar, khususnya di Denpasar Utara, pada tahun 2019. Para calon legislatif dari berbagai etnis, termasuk Agus Wirajaya dari etnis Tionghoa yang diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan untuk menentukan pemimpin.

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam pemilu legislatif menunjukkan kesadaran mereka akan hak-hak sebagai warga negara Indonesia dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak reformasi politik pada tahun 1998, sistem politik Indonesia telah memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara, termasuk warga etnis

Tionghoa, untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai politik dan pemilihan umum. Keterlibatan etnis Tionghoa dalam partisipasi politik, seperti yang ditunjukkan oleh Agus Wirajaya, adalah cerminan dari kesadaran mereka tentang pentingnya berbangsa dan bernegara serta rasa komitmen kebangsaan yang tinggi sebagai warganegara Indonesia. Mereka bukan hanya berurusan dengan pengurusan identitas kewarganegaraan secara pasif, tetapi juga aktif dalam bidang pemerintahan, terutama melalui partai politik.

Etnisitas berperan penting dalam kehidupan politik dan dapat mempengaruhi proses pemilihan dan kehidupan politik secara keseluruhan. Ada tiga pendekatan yang menjelaskan tentang etnisitas, yaitu:

- a. Pendekatan Primordialisme: Etnisitas terbentuk karena adanya ikatan sosial, seperti agama, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan etnisitas dapat menyebabkan perpecahan dalam kelompok dan antar kelompok, terutama dalam proses pemilu.
- b. Pendekatan Konstruktivisme: Etnisitas merupakan hasil dari proses kompleks di mana batas-batas simbolik terus dibangun dan dibentuk melalui mitos, bahasa, dan pengalaman masa lalu.
- c. Pendekatan Instrumentalisme: Etnisitas digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik dari konstituen. Calon dari etnis tertentu dapat memanfaatkan

identitas etnis untuk memperoleh dukungan dalam proses pemilihan.

Dalam konteks pemilu legislatif Kota Denpasar tahun 2019, terlihat bahwa calon legislatif dari etnis Tionghoa, seperti Agus Wirajaya, berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok etnis Tionghoa dengan mengakomodir kebutuhan dan aspirasi mereka. Pendekatan instrumentalisme dalam politik identitas memainkan peran penting dalam membentuk dukungan politik dari masyarakat etnis lokal, tanpa melihat perbedaan etnis. Dengan demikian, etnisitas memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan politik, dan pendekatan yang digunakan oleh calon legislatif dari etnis tertentu dapat mempengaruhi peluang dan tantangan dalam proses pemilihan. Dalam konteks pemilu di Kota Denpasar, penting untuk mengakui pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara serta dukungan politik yang tidak hanya didasarkan pada etnisitas, tetapi juga pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Teori Politik Identitas, terutama pendekatan konstruktivisme, menggambarkan bahwa etnisitas adalah hasil dari proses sosial yang kompleks, di mana batasan-batasan simbolik terus dibangun dan dibentuk melalui mitos dan pengalaman masa lalu. Dalam hal kontestasi politik, pandangan ini melihat isu etnis digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik dengan dalih memperjuangkan kepentingan etnis jika berhasil memperoleh jabatan yang diinginkan. Pada pemilihan legislatif Kota Denpasar tahun 2019, terlihat bahwa calon

legislatif dari etnis Tionghoa, seperti Agus Wirajaya, berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok etnis mereka dengan mengakomodir aspirasi dan kebutuhan mereka. Sikap mengakomodir kelompok etnis lokal menciptakan kesatuan dari etnis Tionghoa untuk mendukung calon legislatif yang berasal dari etnis mereka.

Agus Wirajaya, calon legislatif dari etnis Tionghoa, mampu membangun kepercayaan dan kedekatan dengan kelompok etnisnya serta masyarakat Denpasar Utara melalui kepemimpinannya yang baik. Kemampuan Agus Wirajaya dalam merawat kelompok etnisnya dan mendukung kegiatan seni dan budaya lokal juga berkontribusi pada tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Denpasar terhadapnya.

Pada akhirnya, keterlibatan etnis Tionghoa dalam pemilu legislatif di Kota Denpasar pada tahun 2019 terjadi karena kesadaran akan hak politik mereka sebagai warga negara Indonesia dan ketertarikan mereka dalam pelaksanaan pemerintahan kota Denpasar. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara serta dukungan politik yang tidak hanya didasarkan pada etnisitas, tetapi juga pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pada pemilihan legislatif DPRD Kota Denpasar tahun 2019, Agus Wirajaya berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kota Denpasar periode 2019-2024. Keberhasilan Agus Wirajaya dalam memenangkan pemilu ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor.

Pertama, kemampuan Agus Wirajaya dalam merawat kelompok etnisnya dan membangun kepercayaan masyarakat dari kelompok etnis tersebut serta dari masyarakat Denpasar Utara secara keseluruhan. Pendekatan yang dilakukan oleh Agus Wirajaya dan tim suksesnya berhasil membawa tingkat kepercayaan yang tinggi dari anggota kelompok etnis dan masyarakat. Kedua, Agus Wirajaya memiliki riwayat kepemimpinan yang baik dan telah aktif dalam berbagai kelompok dan organisasi, sehingga ia mendapatkan kepercayaan dari kelompok-kelompok tersebut. Dalam proses pemilihan, Agus Wirajaya dan timnya berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal yang mengembangkan seni budaya Bali, menunjukkan kedekatan dan perhatian terhadap kepentingan etnis lokal.

Penggunaan isu identitas dalam menarik simpati pemilih juga menjadi faktor utama kesuksesan Agus Wirajaya dalam pemilu. Faktor sosiologis dalam perilaku pemilih yang cenderung memilih kandidat berdasarkan etnis yang sama berpengaruh, dan politisasi identitas berhasil mengumpulkan dukungan dari kelompok etnis Tionghoa yang dominan di kota Denpasar. Strategi kemenangan Agus Wirajaya tergolong terorganisir dengan fokus pada etnis Tionghoa dan kolaborasi antara kuantitas penduduk yang mendominasi di Bali serta kemampuan mengkoordinasikan kelompok etnis. Dukungan dari partai politik, keluarga, kerabat, dan masyarakat kota Denpasar juga memberikan kontribusi signifikan

terhadap keberhasilan terpilihnya Agus Wirajaya sebagai anggota legislatif.

Dalam keseluruhan, politisasi identitas dan strategi yang terorganisir dalam mendapatkan dukungan dari kelompok etnis Tionghoa menjadi poin kunci dalam kesuksesan Agus Wirajaya dalam pemilihan legislatif Kota Denpasar tahun 2019. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan pendekatan politik identitas dalam konteks pemilu untuk mencapai dukungan dan kemenangan dari kelompok etnis tertentu.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari peran etnisitas dan basis massa anggota DPRD dalam pemilu legislatif 2019 di Kota Denpasar adalah etnisitas memainkan peran penting dalam pemilu legislatif di Kota Denpasar. Pada pemilu tahun 2019, terlihat adanya politisasi identitas yang dilakukan oleh beberapa calon anggota legislatif, terutama yang berasal dari etnis Tionghoa. Politisasi identitas ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari kelompok etnis tertentu dengan menekankan kesamaan identitas dan karakteristik budaya. Faktor sosiologis dari perilaku pemilih yang cenderung memilih kandidat dari etnis yang sama juga berperan dalam strategi politik identitas ini.

Basis massa anggota DPRD Kota Denpasar menjadi penentu utama dalam keberhasilan pemilu legislatif 2019. Calon anggota legislatif yang berhasil membangun dukungan dan basis massa yang kuat dari kelompok etnisnya, kelompok masyarakat lokal, dan partai politik memiliki peluang besar untuk terpilih. Kemampuan calon anggota legislatif dalam merawat kelompok etnisnya, membangun kedekatan dengan berbagai kelompok, dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan dalam pemilu.

Pendekatan politik identitas yang digunakan oleh beberapa calon anggota legislatif, terutama dari etnis Tionghoa, berhasil mendapatkan dukungan kuat dari kelompok etnis mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini juga bisa menciptakan tantangan, seperti potensi perpecahan antar kelompok maupun dalam kelompok jika isu etnis digunakan secara membedakan. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan kebijaksanaan dan kesadaran untuk tetap memajukan kepentingan seluruh masyarakat Kota Denpasar secara keseluruhan.

Kesimpulannya, pemilu legislatif 2019 di Kota Denpasar menunjukkan bahwa etnisitas dan basis massa anggota

DPRD memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilihan. Pendekatan politik identitas dalam membangun dukungan dan memenangkan pemilu menjadi strategi yang digunakan oleh beberapa calon anggota legislatif, namun perlu dihadapi dengan bijaksana dan kesadaran untuk menghindari polarisasi dan memastikan keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta.
- Bajaril, D. A., & Saragih, D. S. (2011). *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Barth, F. (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Jakarta : UI Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Canggara. (2019). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hank, J. R., Enrique, G., & Larana, J. (1994). *New Social Movements*. Philadelphia: Temple University Press.
- Huberman, M. D. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku*. Jakarta: UIP.
- Keller, S. (1984). *Penguasa dan kelompok elit*. Jakarta : Rajawali
- Meloeng. (2014). *Metode Penelitian Kualitati*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, B, M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku*. Jakarta: UIP.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- T.K.Oommen. (2009). *Kewarganegaraan, Kebangsaan , & Etnisitas*. Lombok : Bantul Kreasi Wacana .
- Jurnal (daring);**
- Ardipandanto, A. (2019). *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. XI.11/II/Puslit/Juni/2019.
- Mahendra, I. B. (2021). *Strategi Politik Newcomer Dalam Kontestasi Politik Studi Kasus: Keterpilihnya Anggota DPRD Kota Denpasar Dari Partai PSI Pada Pemilu 2019*. *Politika Udayana*.
- Internet;**
- Baliberkarya.com. (2020, 10 2). *Dinilai Sosok Milenial Komit Lestarikan Seni Budaya, Teruna Teruni Abigangsa Siap*

Menangkan Paket Amerta.
Retrieved from
Baliberkarya.com:
<https://www.baliberkarya.com/read/202010020001/dinilai-sosok-milenial-komit-lestarikan-seni-budaya-teruna-teruni-abigangsa-siap-menangkan-paket-amerta.html>

KPU. (2019, Desember 2019).
Pemilu2019. Diakses 20 Januari
2022, dari Kpu.go.id:
<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/hitung-suara/>